

SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL: IMPERATIF FUNGSIONAL DAN KESENJANGAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PEDESAAN INDONESIA

Atik Kurniawati^{1*}, Marista Christina Shally Kabelen², Rusfadia Saktiyanti Jahja³, Afdhal⁴
^{1,2,3} Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia
⁴ Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Indonesia
 *Email korespondensi: atikkurniawati@unj.ac.id

Abstrak

Kesenjangan pendidikan di wilayah rural Indonesia mencerminkan persoalan struktural yang kompleks dan berlapis. Studi ini bertujuan menganalisis fungsi sistem sosial sekolah di wilayah rural melalui kerangka AGIL Parsons (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*) untuk memahami bagaimana sekolah berperan dalam menopang dan mereproduksi struktur sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di SMAN 13 Kabupaten Tangerang sebagai representasi sekolah rural dekat perkotaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 37 informan, observasi partisipan, dan studi dokumen selama April–Juli 2025, lalu dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan peran adaptasi sekolah terhadap keterbatasan ekonomi dan sumber daya, pencapaian tujuan melalui transmisi nilai mobilitas sosial yang terhambat oleh fasilitas dan kebijakan, integrasi lewat kolaborasi informal sekolah–keluarga–komunitas, serta pemeliharaan pola budaya melalui internalisasi nilai lokal dan religius yang kadang bertentangan dengan modernisasi. Kebaruan studi ini terletak pada penerapan empiris teori AGIL dalam konteks rural, memberikan kontribusi teoritis pada sosiologi pendidikan serta dasar kebijakan yang lebih kontekstual dan holistik.

Kata Kunci: AGIL Parsons, Indonesia Rural, Kesenjangan Pendidikan, Sistem Sosial, Sosiologi Pendidikan

Abstract

Educational inequality in rural Indonesia reflects complex and layered structural issues. This study aims to analyze the social system functions of rural schools through Parsons' AGIL framework (*Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency*), examining how schools sustain and reproduce social structures. A qualitative case study was conducted at SMAN 13 in Tangerang Regency, representing rural schools near urban areas. Data were collected through in-depth interviews with 37 participants, participant observation, and document analysis between April and July 2025, followed by thematic analysis. The findings reveal the school's adaptive role in responding to economic and resource limitations; *goal attainment* through transmitting mobility values, constrained by inadequate facilities and policies; *integration* through informal collaboration among schools, families, and communities; and cultural pattern maintenance via local and religious values that sometimes conflict with modernization. The study's novelty lies in its empirical application of AGIL theory to rural schooling, offering theoretical contributions to educational sociology and providing a contextual basis for holistic policy development.

Keywords: AGIL Parsons, Educational Inequality, Rural Indonesia, Social System, Sociology of Education

PENDAHULUAN

Kesenjangan pendidikan di Indonesia bukanlah fenomena baru, tetapi ia terus berulang dalam berbagai bentuk dan skala, terutama di wilayah rural (Mujiburrohman & Putri, 2024; Rafsanjani & Rozaq, 2024). Meskipun negara ini telah mencatat kemajuan signifikan dalam hal angka partisipasi sekolah dan pembangunan infrastruktur pendidikan, ketimpangan kualitas antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan tetap menjadi realitas yang membandel. Sekolah-sekolah di wilayah rural, bahkan yang hanya berjarak sekitar 50 kilometer dari pusat metropolitan seperti Jakarta, masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses sumber daya pendidikan, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga pola interaksi sosial yang membentuk proses belajar mengajar di dalamnya (Lisnawaty, 2024). Permasalahan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan tidak semata-mata terletak pada aspek geografis, melainkan juga merupakan masalah struktural dan kultural yang berakar dalam sistem sosial masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah tidak hanya berperan sebagai institusi penyedia layanan pendidikan, tetapi juga sebagai sistem sosial yang menopang, mereproduksi, dan dalam beberapa hal justru memperdalam ketimpangan sosial yang ada.

Berbagai laporan nasional menunjukkan betapa tajamnya kesenjangan tersebut. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024 menunjukkan bahwa 43% sekolah menengah atas di wilayah rural memiliki rasio guru dan murid yang jauh dari standar ideal, sementara 38% di antaranya mengalami keterbatasan sarana laboratorium dan perpustakaan (Haidir & Setyari, 2024). Dalam hal capaian akademik, skor Asesmen Nasional pada sekolah rural tertinggal sekitar 17% dibandingkan sekolah di wilayah urban. Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan di wilayah rural bukan hanya soal “jarak” dari kota besar, melainkan tentang terbatasnya daya dukung sistemik yang melingkupi sekolah, baik dari sisi ekonomi keluarga, infrastruktur pendidikan, maupun jaringan sosial dan kultural yang menopangnya (Ekaputri et al., 2025). Sekolah menjadi cermin dari dinamika sosial masyarakat sekitarnya: ketika masyarakat berada dalam tekanan ekonomi, sekolah pun harus beradaptasi dalam keterbatasan.

Dalam wacana sosiologi pendidikan, sekolah sering dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Talcott Parsons dalam kerangka teorinya menyatakan bahwa setiap sistem sosial memiliki empat imperatif fungsional,

Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency (AGIL), yang harus terpenuhi agar sistem tersebut dapat bertahan dan berfungsi secara efektif. Sekolah sebagai institusi tidak hanya menjalankan fungsi pedagogis, tetapi juga memainkan peran sosial yang kompleks: menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan (*adaptation*), menetapkan dan mencapai tujuan pendidikan (*goal attainment*), menciptakan kohesi sosial (*integration*), dan menjaga serta mereproduksi nilai-nilai budaya masyarakat (*latency*). Dalam konteks rural Indonesia, bagaimana keempat fungsi tersebut bekerja, dan sejauh mana fungsi itu benar-benar berjalan efektif, menjadi pertanyaan penting yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang kondisi pendidikan di wilayah rural Indonesia. Misalnya, Mujiburrohmah & Putri (2024) menyoroti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah urban dan rural di Asia Tenggara, menunjukkan bahwa perbedaan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi keluarga dan dukungan institusional. Sementara itu, Wirandana & Khoirunurrofik (2024) dalam kajiannya di India memperlihatkan bahwa sekolah rural seringkali terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, minim sumber daya, rendah

capaian akademik, dan terbatasnya mobilitas sosial. Studi di Indonesia oleh Ninghardjanti et al. (2023) menemukan bahwa sekolah di pedesaan mengalami kesulitan mempertahankan kualitas pembelajaran akibat kurangnya guru bersertifikasi dan lemahnya dukungan komunitas. Penelitian lain oleh Hakim & Rosini (2022) memperlihatkan bahwa program intervensi pendidikan pemerintah sering kali tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan sangat terbatas. Keempat penelitian ini memberikan pemahaman yang kaya mengenai kondisi struktural pendidikan rural, namun mayoritas berhenti pada analisis kebijakan dan ekonomi tanpa menyentuh aspek sosiologis dari sistem sekolah itu sendiri.

Selain itu, terdapat pula penelitian-penelitian yang menyoroti dimensi sosial dan budaya pendidikan rural. Faizah et al. (2021) menunjukkan bahwa norma dan nilai lokal dapat memperkuat atau justru menghambat internalisasi nilai pendidikan modern. Studi oleh Romlah et al. (2023) menggambarkan bagaimana sekolah rural sering menjadi arena negosiasi antara tradisi lokal dan tuntutan modernitas pendidikan nasional. Dalam konteks ini, integrasi sosial di dalam sekolah menjadi kunci penting dalam membangun lingkungan belajar yang

efektif. Namun, sebagaimana dicatat oleh Hill (2021), pendekatan intervensi sosial di sekolah rural sering kali bersifat top-down, kurang memahami dinamika internal komunitas sekolah sebagai sistem sosial yang hidup. Penelitian-penelitian tersebut membuka ruang refleksi penting bahwa pendidikan di wilayah rural tidak hanya bisa dipahami lewat angka-angka dan rasio, tetapi melalui relasi sosial yang membentuk praktik pendidikan sehari-hari.

Kajian internasional juga memperlihatkan relevansi pendekatan sistem sosial dalam memahami institusi pendidikan. Welch & Aziz (2022) menunjukkan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi mempengaruhi praktik pendidikan melalui mekanisme reproduksi sosial. Setyadharma et al. (2021) menegaskan bahwa sekolah menjadi arena reproduksi budaya yang sering kali memperkuat ketimpangan kelas sosial. Dalam konteks negara berkembang, Hasmawati et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya modal sosial dalam mendukung efektivitas sekolah di wilayah dengan sumber daya terbatas. Namun, kebanyakan studi ini berfokus pada konteks urban atau semi-urban dan tidak menguraikan secara sistematis bagaimana imperatif sistemik bekerja dalam konteks rural, terutama dalam wilayah yang secara

geografis dekat dengan pusat kota tetapi secara struktural tetap tertinggal.

Studi di Indonesia juga memperlihatkan kesenjangan yang serupa. Penelitian oleh Khairunnisa et al. (2025) memperlihatkan bagaimana kebijakan pendidikan nasional sering kali tidak sepenuhnya menjangkau kebutuhan spesifik sekolah rural. Meskipun banyak kebijakan dirancang untuk pemerataan, implementasi di lapangan sering kali bias kota dan mengabaikan konteks sosial masyarakat rural. Fadhil & Sabic-El-Rayess (2021) bahkan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan pendidikan yang terlalu teknokratis cenderung meminggirkan dimensi sosial dari praktik pendidikan. Demikian pula, studi oleh Afdhal et al. (2024) dan Litaay et al. (2025) memperlihatkan adanya jarak antara idealisme kurikulum nasional dan realitas pelaksanaan di sekolah-sekolah rural, terutama dalam hal ketersediaan guru, fasilitas, dan dukungan masyarakat.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami ketimpangan pendidikan, sebagian besar kajian masih terfragmentasi, terpisah antara pendekatan kebijakan, ekonomi, dan sosial, tanpa kerangka analitis yang menyatukan keempat fungsi sosial sekolah secara utuh. Jarang ada kajian yang

benar-benar mengamati sekolah sebagai sistem sosial yang hidup, dengan mekanisme adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola nilai yang bekerja (atau tidak bekerja) di dalamnya. Terlebih lagi, kajian mengenai sekolah rural di Indonesia kerap mengasumsikan rural sebagai wilayah terpencil dan jauh dari kota, padahal banyak sekolah rural justru terletak tidak jauh dari pusat metropolitan, namun tetap mengalami marginalisasi struktural. Inilah bentuk ruralitas yang tidak selalu geografis, tetapi sosial dan sistemik.

Dalam konteks inilah penelitian ini mengambil posisi yang berbeda. Dengan menggunakan kerangka AGIL Parsons, penelitian ini mencoba membaca sekolah bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan, tetapi sebagai sistem sosial dengan fungsi-fungsi yang saling terkait dan membentuk dinamika internalnya. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap bagaimana sekolah rural beradaptasi dengan keterbatasan ekonomi, bagaimana ia menetapkan dan mengejar tujuan pendidikan di tengah struktur yang timpang, bagaimana ia menciptakan integrasi sosial antara berbagai aktor, guru, siswa, keluarga, dan komunitas, dan bagaimana ia menjaga serta mentransmisikan nilai-nilai budaya lokal. Fokus ini membawa perspektif yang lebih

kaya untuk memahami kesenjangan pendidikan, bukan hanya dari sisi input dan output, tetapi dari mekanisme sosial yang menopang (dan terkadang membatasi) fungsi sekolah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembaca sosiologis yang lebih dalam terhadap sekolah rural Indonesia, khususnya di wilayah yang dekat dengan kota namun tetap mengalami marginalisasi. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus di SMAN 13 Kabupaten Tangerang, penelitian ini berupaya menggambarkan secara empiris bagaimana fungsi-fungsi AGIL bekerja di lapangan. Dari sini, diharapkan dapat muncul pemahaman baru tentang kesenjangan pendidikan sebagai persoalan sistem sosial, bukan semata masalah fasilitas atau kebijakan teknis. Perspektif ini tidak hanya memperkaya khazanah sosiologi pendidikan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih kontekstual, sensitif terhadap dinamika sosial masyarakat rural, dan tidak terjebak dalam pendekatan teknokratis yang kaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam dinamika sosial yang

berlangsung di dalam institusi sekolah, bukan sekadar mengukur atau membandingkan variabel-variabel kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, makna, dan interaksi sosial yang membentuk fungsi sistem sosial sekolah sebagaimana dikemukakan Creswell & Poth (2016), bahwa penelitian kualitatif sangat tepat untuk mengungkap fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual. Dalam hal ini, sekolah dipahami sebagai sistem sosial hidup yang berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat rural. Metode studi kasus digunakan karena memberikan ruang untuk eksplorasi mendalam terhadap satu unit analisis, yaitu sekolah, dengan segala konteks dan keunikannya.

Lokasi penelitian dipilih di SMAN 13 Kabupaten Tangerang, sebuah sekolah menengah atas negeri yang terletak di wilayah rural namun sangat dekat dengan kawasan metropolitan Jakarta. Pemilihan lokasi ini bukan kebetulan, melainkan didasarkan pada pertimbangan teoretis dan empiris. Sekolah ini mencerminkan fenomena rurality yang tidak hanya ditentukan oleh jarak geografis, tetapi juga oleh keterbatasan struktural yang terus melekat, meskipun berada di lingkaran

pinggiran kota besar. Dengan demikian, lokasi ini menjadi representasi yang kuat untuk memahami bagaimana sistem sosial sekolah bekerja dalam situasi ambivalen antara ruralitas dan kedekatan dengan modernitas kota.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pertimbangan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan Abfalter et al. (2021). Total terdapat 37 informan yang terlibat, terdiri dari kepala sekolah, 8 orang guru, 20 siswa, dan 8 orang tua siswa. Kepala sekolah dipilih karena memiliki perspektif strategis terhadap kebijakan internal dan tantangan kelembagaan. Guru mewakili pelaku utama dalam proses pedagogis sehari-hari, sementara siswa dipilih karena mereka adalah subjek yang mengalami langsung interaksi sosial di dalam sistem sekolah. Orang tua dilibatkan untuk menggambarkan keterhubungan sekolah dengan lingkungan keluarga, yang menjadi salah satu aspek penting dalam fungsi sosial sekolah. Kombinasi aktor-aktor ini memungkinkan penelitian menangkap dinamika sistemik secara utuh dari berbagai lapisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan

interpretasi aktor-aktor sekolah terhadap kondisi sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi proses pendidikan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap terbuka terhadap temuan lapangan yang tidak terduga namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Kedua, observasi partisipan dilakukan di dalam lingkungan sekolah untuk memahami praktik sosial dan interaksi keseharian, termasuk kondisi fisik sarana prasarana, pola interaksi antarwarga sekolah, serta dinamika kegiatan pembelajaran. Observasi memungkinkan peneliti menangkap realitas empiris yang tidak selalu muncul dalam wawancara. Ketiga, studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen resmi sekolah, kebijakan pendidikan, serta data statistik terkait kondisi pendidikan di wilayah tersebut. Ketiga teknik ini dipilih untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, mendalam, dan kontekstual terhadap fungsi sistem sosial sekolah.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan, kemudian dilakukan tabulasi data dan penyusunan tabel observasi untuk membantu pemetaan empat imperatif sistem sosial AGIL (*Adaptation, Goal attainment, Integration,*

Latency). Proses ini memudahkan peneliti menelusuri relasi antar fungsi sistemik dalam konteks kehidupan sekolah sehari-hari.

Untuk memastikan validitas temuan, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen, sementara triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan temuan dari teknik pengumpulan data yang berbeda. Strategi ini tidak hanya memperkuat kredibilitas penelitian, tetapi juga memastikan bahwa analisis yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kenyataan sosial di lapangan (Vindrola-Padros & Johnson, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Adaptation* (A): Sekolah dan Strategi Bertahan di Tengah Keterbatasan Sumber Daya**

Adaptasi merupakan fungsi imperatif pertama dalam kerangka AGIL (Parsons, 1957) yang menekankan kemampuan sistem sosial untuk merespons tekanan eksternal melalui penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Dalam konteks SMAN 13 Kabupaten Tangerang, adaptasi sekolah berlangsung dalam situasi keterbatasan sumber daya ekonomi, infrastruktur

pendidikan yang minim, dan dukungan kebijakan yang tidak merata. Sekolah sebagai sistem sosial harus menegosiasikan relasinya dengan lingkungan eksternal, terutama dengan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa yang berada dalam lapisan masyarakat menengah ke bawah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas orang tua siswa bekerja di sektor informal, sebagai buruh pabrik, satpam, buruh cuci, atau pekerja serabutan, dengan tingkat pendidikan rendah dan penghasilan yang terbatas. Mereka menyekolahkan anak di sekolah negeri karena gratis, dengan uang saku harian rata-rata sekitar Rp10.000. Orientasi mereka terhadap pendidikan pun bersifat pragmatis: cukup agar anak dapat mandiri dan bekerja setelah lulus SMA, bukan melanjutkan kuliah.

Kondisi ekonomi keluarga secara langsung mempengaruhi kehadiran dan partisipasi siswa. Dari observasi harian, tampak bahwa sebagian besar siswa datang ke sekolah dengan berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum, sementara hanya sebagian kecil yang memiliki kendaraan pribadi. Dalam percakapan informal, guru wali kelas menyebutkan bahwa banyak siswa mengaitkan kehadiran mereka di sekolah dengan kepemilikan fasilitas pribadi seperti sepeda motor. Ketika fasilitas itu tidak tersedia, mereka memilih

untuk tidak datang ke sekolah. Dalam satu kasus, seorang siswa bahkan berhenti sekolah sementara waktu karena orang tuanya tidak sanggup memenuhi keinginan anaknya untuk membeli motor. Setelah guru melakukan kunjungan rumah, siswa tersebut akhirnya kembali ke sekolah dengan pemahaman baru bahwa pendidikan harus dijalani sesuai kemampuan keluarga.

Permasalahan ekonomi juga memunculkan ketegangan dalam proses belajar mengajar. Sering kali guru menemukan siswa tidak hadir secara konsisten, terlambat datang, tidak mengerjakan tugas, atau menunjukkan ketidaktertarikan dalam pelajaran seperti Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA. Guru BK menyebut bahwa masih ada siswa yang absen lebih dari 20% dari total hari belajar. Hal ini menggambarkan rendahnya komitmen terhadap pendidikan, baik dari sisi siswa maupun orang tua. Beberapa keluarga bahkan terjerat pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sementara anak-anak mereka mencoba mencari jalan pintas melalui judi online. Ketika kebutuhan ekonomi dasar belum terpenuhi, orientasi terhadap pendidikan menjadi abstrak dan jauh dari prioritas utama. Temuan ini mengafirmasi analisis Parsons bahwa adaptasi sistemik hanya dapat berjalan efektif bila kebutuhan dasar

lingkungan sosial juga terpenuhi, sebab ekonomi menjadi sarana untuk menyesuaikan masyarakat terhadap realitas eksternal.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, sekolah tetap berupaya beradaptasi secara sistemik. Kepala sekolah dan para guru menjadi aktor kunci dalam menggerakkan proses adaptasi ini. Mereka berperan sebagai penghubung antara tekanan eksternal dan kapasitas internal sekolah, misalnya dengan mengoptimalkan peran komite sekolah, menjalin solidaritas komunitas lokal, dan melakukan inovasi dalam pengelolaan fasilitas yang terbatas. Dalam observasi lapangan, terlihat ruang-ruang kelas yang minim sarana digital, meja kursi yang sudah lama dipakai, dan laboratorium yang hanya berfungsi sebagian. Namun ruang ini tetap digunakan secara maksimal melalui pengaturan jadwal yang fleksibel dan pembagian fasilitas lintas kelas.

Strategi adaptasi juga mencakup mekanisme informal yang mengandalkan hubungan sosial komunitas. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat lokal dilibatkan dalam kegiatan sekolah secara sukarela. Meski tidak terstruktur secara formal, kolaborasi ini menjadi bentuk daya lenting sosial sekolah dalam menghadapi tekanan struktural. Pendekatan ini sejalan dengan

teori resilience in education yang menekankan pentingnya kapasitas institusi pendidikan untuk bertahan dan bertransformasi di tengah tekanan lingkungan (Banaji et al., 2021).

Namun, ketegangan antara tuntutan kurikulum nasional dan kapasitas lokal tetap menjadi tantangan besar. Kurikulum yang seragam secara nasional tidak sepenuhnya memperhitungkan kondisi sosio-ekonomi rural yang penuh keterbatasan. Guru sering kali harus mengimprovisasi strategi pengajaran agar materi tetap tersampaikan meski fasilitas terbatas. Proses adaptasi ini menggambarkan fleksibilitas institusi sekolah dalam bertahan hidup, namun juga menegaskan kesenjangan struktural yang membatasi pencapaian fungsi adaptasi secara optimal. Adaptasi dalam konteks ini bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang bagaimana sistem sosial sekolah berusaha tetap relevan dan fungsional di tengah tekanan lingkungan eksternal yang keras.

Goal attainment (G): Transmisi Mobilitas Sosial dan Keterbatasan Struktural

Fungsi *goal attainment* dalam kerangka AGIL Parsons (1957) menekankan kemampuan sistem sosial untuk merumuskan tujuan bersama dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk

mencapainya. Dalam konteks sekolah rural seperti SMAN 13 Kabupaten Tangerang, fungsi ini beroperasi dalam ketegangan antara visi institusional yang ideal dengan realitas keterbatasan struktural. Visi sekolah, “Terwujudnya Peserta Didik Berprestasi, Berakhlak Mulia, dan Mandiri,” secara normatif mencerminkan tujuan luhur pendidikan nasional: membentuk individu yang cerdas, bermoral, dan berdaya saing. Namun, dalam implementasinya, visi ini harus dinegosiasikan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa, keterbatasan fasilitas, serta dukungan kebijakan yang belum optimal.

Tujuan pendidikan di sekolah ini dipahami oleh pihak sekolah sebagai upaya untuk mentransmisikan nilai mobilitas sosial kepada siswa. Sekolah diharapkan menjadi jembatan bagi anak-anak dari keluarga kelas pekerja menuju kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan. Namun, hasil wawancara dengan beberapa orang tua menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap “keberhasilan sekolah” masih sangat pragmatis. Seorang informan menyebutkan bahwa tujuan utama menyekolahkan anak adalah agar anak “tidak nongkrong saja di rumah” dan “bisa bekerja setelah lulus,” bukan agar anak menempuh pendidikan tinggi atau mengembangkan kapasitas intelektualnya. Perspektif ini sejalan dengan

kondisi ekonomi keluarga yang sebagian besar bekerja di sektor informal, sehingga orientasi masa depan anak juga sangat dekat dengan dunia kerja berupah rendah, bukan dengan mobilitas vertikal berbasis pendidikan.

Persepsi tentang keberhasilan juga tidak seragam. Guru memaknai keberhasilan sebagai keberhasilan akademik dan pembentukan karakter, sementara banyak siswa justru melihat sekolah sebagai ruang sosial, tempat berkumpul dengan teman dan menghindari pengangguran. Guru BK menuturkan bahwa motivasi belajar banyak siswa rendah karena mereka tidak melihat jalur pendidikan sebagai jalan mobilitas sosial yang nyata. Banyak alumni langsung bekerja di sektor informal atau industri berupah rendah setelah lulus, hanya sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini mengonfirmasi adanya *capability gap* antara harapan normatif dan kapasitas riil, sebagaimana ditekankan oleh *capability approach* yang menyatakan bahwa kesempatan nyata individu untuk mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kondisi struktural di sekitarnya (Haidir & Setyari, 2024).

Dari sisi aktor, kepala sekolah berperan dalam perencanaan strategis baik jangka pendek, seperti evaluasi kurikulum dan pembelajaran, maupun jangka panjang,

seperti perbaikan fasilitas dan pelatihan guru. Guru berfungsi sebagai agen transmisi pengetahuan dan nilai, namun dalam praktiknya banyak guru mengalami stagnasi pengembangan profesional. Forum-forum pelatihan guru yang minim dan terbatasnya jejaring eksternal menyebabkan mereka tidak memiliki saluran untuk mengembangkan kapasitas diri dan siswanya. Sementara itu, peran orang tua dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah juga terbatas pada dukungan minimal, terutama karena kendala ekonomi.

Kesenjangan antara visi sekolah dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan institusional tidak otomatis menjadi konsensus bersama. Visi yang tidak diterjemahkan menjadi strategi operasional konkret dan tidak didukung oleh sumber daya yang memadai cenderung berhenti sebagai slogan normatif. Hal ini memperlihatkan bahwa *goal attainment* dalam sistem sosial sekolah rural tidak hanya soal perumusan tujuan, tetapi juga tentang sejauh mana lingkungan struktural memungkinkan realisasi tujuan tersebut. Ketika daya dukung struktural lemah, maka tujuan pendidikan yang diorientasikan pada mobilitas sosial pun hanya menjadi cita-cita yang sulit diwujudkan.

Integrasi dan Latensi: Mengatur Perilaku dan Menjaga Karakter Sosial

Integrasi sosial dalam konteks sekolah rural tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sistem sosial mengatur pola perilaku dan menjaga “karakter sosial” komunitas sekolah. Dalam kerangka AGIL Parsons, integrasi (*integration*) dan pemeliharaan pola (*latency*) adalah dua dimensi penting yang memastikan sistem sosial tetap stabil dan berfungsi dalam jangka panjang. Parsons (1957) menekankan bahwa konsensus sosial tidak akan bertahan hanya dengan mengandalkan kesepahaman atau kebiasaan bersama, tetapi membutuhkan dukungan struktur normatif dan legalitas yang lebih kuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks sekolah, hal ini berarti nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta etika sosial siswa harus dipelihara bukan sekadar melalui kebiasaan informal, tetapi melalui mekanisme yang jelas, baik berupa reward maupun punishment, yang dijalankan secara konsisten.

Dari observasi lapangan, salah satu masalah utama yang muncul di sekolah rural adalah tingginya tingkat keterlambatan siswa yang terjadi berulang setiap hari. Data menunjukkan bahwa ada sekitar 40–50 siswa yang datang terlambat setiap pagi, dan kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa

ada perubahan signifikan. Kepala sekolah menyebut bahwa “anak-anak sudah terbiasa datang terlambat karena tidak ada konsekuensi,” menunjukkan bagaimana lemahnya unsur integrasi dalam sistem sosial sekolah tersebut. Tidak adanya mekanisme punishment yang jelas membuat perilaku menyimpang menjadi “biasa,” dan pada titik tertentu, menjadi bagian dari budaya sekolah itu sendiri. Di sisi lain, apresiasi terhadap perilaku positif juga nyaris tidak terlihat. Padahal, seperti dikatakan Parsons, konsensus sosial dapat diperkuat melalui kombinasi hadiah dan sanksi, dua instrumen sosial yang membentuk pola perilaku kolektif.

Sekolah sebenarnya memiliki potensi besar untuk menggunakan mekanisme sederhana namun bermakna untuk memperkuat integrasi ini. Misalnya, memberikan pengumuman siswa teladan saat upacara bendera, menuliskan nama siswa berprestasi di mading, atau mengunggah apresiasi di media sosial sekolah. Hal-hal sederhana ini dapat menjadi bentuk simbolik dari reward system yang menumbuhkan rasa bangga, penghargaan, dan pada akhirnya memperkuat kepatuhan terhadap norma sekolah. Sebaliknya, untuk perilaku yang tidak sesuai, sekolah dapat menerapkan bentuk punishment yang bersifat edukatif, misalnya memberikan

tugas tanggung jawab sosial atau konseling, bukan hukuman represif. Dalam praktiknya, mekanisme ini telah terbukti efektif di sekolah-sekolah pedesaan lainnya. Misalnya, penelitian di Padang menunjukkan tingkat kedisiplinan siswa mencapai 92,2% setelah penerapan reward dan punishment (Fani Julia Fiana et al., 2013). Di Cirebon, pendekatan bimbingan kelompok juga berhasil meningkatkan kedisiplinan siswa dari 35,3% menjadi 87,5% (Lestaluhu & Sopacua, 2024).

Namun, integrasi tidak hanya soal aturan, tetapi juga bagaimana aturan itu dihidupkan dalam keseharian. Dari wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran, NS, terungkap bahwa “anak-anak sering tidur di kelas atau pura-pura izin ke toilet” ketika pembelajaran berlangsung. Hal ini bukan sekadar soal kurang disiplin, tetapi menunjukkan rendahnya internalisasi nilai belajar. Dengan kata lain, *latency*, fungsi sistem untuk mempertahankan nilai dan budaya, belum bekerja optimal. Dalam pandangan Parsons, *latency* memastikan bahwa pola-pola budaya yang menjadi dasar tindakan sosial dipelihara lintas generasi melalui proses sosialisasi yang konsisten. Di sekolah, fungsi ini dijalankan melalui pembiasaan, simbol-simbol budaya, dan praktik pendidikan sehari-hari.

Pendidikan pada akhirnya bukan hanya soal transfer pengetahuan, melainkan proses sosialisasi nilai dan norma. Sekolah menjadi ruang penting di mana nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, dan integritas ditanamkan melalui tindakan-tindakan kecil yang berulang setiap hari. Ketika siswa terbiasa dihargai atas perilaku positifnya dan memahami konsekuensi dari perilaku negatifnya, maka terbentuklah pola sosial yang lebih stabil. Ikatan sosial dalam sekolah menjadi lebih kuat, bukan hanya karena kedekatan personal, tetapi karena adanya sistem nilai dan norma yang diinternalisasi bersama.

Fungsi *latency* juga bekerja melalui peran keluarga dan komunitas lokal. Dalam konteks rural, nilai-nilai sosial komunitas seperti gotong royong, rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, dan semangat kebersamaan menjadi sumber penting pembentukan karakter siswa. Namun, nilai-nilai ini perlu dipadukan dengan mekanisme integratif formal di sekolah. Tanpa jembatan antara keduanya, nilai lokal akan terfragmentasi, dan sekolah akan kehilangan daya sosialisasinya. Sebaliknya, jika nilai-nilai ini diinstitutionalkan melalui program sekolah, misalnya dalam kegiatan rutin kebersihan, apel pagi, atau program penghargaan, maka nilai tersebut akan

menjadi bagian dari budaya sekolah yang hidup.

Diskusi Lintas Fungsi: Ketimpangan Struktural dan Daya Lentur Sistem Sosial Sekolah

Diskusi lintas fungsi dalam kerangka AGIL Parsons membuka pemahaman bahwa kesenjangan pendidikan di wilayah rural bukanlah fenomena yang lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dari interaksi kompleks antar fungsi adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan pemeliharaan pola budaya (*latency*). Keempat fungsi ini membentuk struktur dinamis sekolah sebagai sistem sosial yang lentur namun rentan, terutama ketika salah satu fungsi tidak berjalan optimal. Dalam konteks SMAN 13 Kabupaten Tangerang, ketidakseimbangan ini sangat nyata: keterbatasan sumber daya memengaruhi kemampuan adaptasi sekolah, yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan pendidikan, memperlemah integrasi sosial, dan menimbulkan ketegangan antara nilai lokal dan tuntutan modernisasi pendidikan.

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa kemampuan adaptasi sekolah terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa sangat terbatas. Sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan

penghasilan menengah ke bawah, sehingga banyak dari mereka yang harus membantu pekerjaan rumah tangga atau usaha keluarga sepulang sekolah. Guru BK menyebut bahwa “anak-anak sering kelelahan, bukan karena malas belajar, tapi karena mereka harus bantu orang tua di rumah.” Kondisi ini berdampak langsung pada konsistensi kehadiran dan fokus belajar siswa. Adaptasi yang terbatas ini kemudian berimbas pada fungsi pencapaian tujuan, karena meskipun sekolah berupaya mencapai target akademik dan kurikulum nasional, keterbatasan waktu, energi, dan fasilitas membuat capaian akademik siswa tidak optimal.

Daya adaptasi yang lemah memperlemah pula kemampuan sekolah dalam mengintegrasikan berbagai aktor sosial secara efektif. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas memang terjadi, tetapi lebih bersifat informal dan tidak terstruktur. Banyak guru mengandalkan komunikasi personal ketimbang mekanisme kelembagaan. Informan KS, seorang guru senior, menyampaikan bahwa komunikasi dengan orang tua sering “hanya lewat WA, kalau sempat,” menunjukkan lemahnya integrasi struktural yang sistematis. Akibatnya, masalah kedisiplinan, kehadiran, atau capaian belajar sering tidak tertangani secara komprehensif.

Sementara itu, fungsi *latency* atau pemeliharaan budaya justru tampil lebih kuat dibanding fungsi lainnya. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, religiusitas, dan rasa hormat terhadap guru masih sangat kuat di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Namun, kekuatan ini juga menyimpan paradoks: nilai-nilai tersebut sering tidak selaras dengan tuntutan modernisasi pendidikan. Misalnya, ketika kegiatan keagamaan atau acara adat dianggap lebih penting daripada kegiatan akademik, siswa sering absen tanpa konsekuensi berarti. Observasi pada bulan Mei 2025 mencatat adanya penurunan drastis kehadiran siswa saat musim acara keagamaan komunitas berlangsung. Hal ini memperlihatkan bagaimana *latency* yang kuat dapat memperlemah pencapaian tujuan pendidikan jika tidak dikelola dengan baik.

Ketimpangan ini semakin tajam ketika kebijakan nasional, seperti penerapan Merdeka Belajar, menuntut fleksibilitas dan inovasi sekolah, tetapi infrastruktur dan daya adaptasi sekolah rural tidak mendukung. Guru mata pelajaran, NS, mengungkapkan bahwa “kurikulum baru bagus idenya, tapi di sini susah jalan kalau fasilitasnya terbatas.” Pernyataan ini mencerminkan ketegangan antara tuntutan struktural dari atas dengan kapasitas riil di lapangan. Dalam perspektif Maroungkas et al. (2023), sekolah harus

dipahami sebagai ekosistem sosial yang saling bergantung. Kelemahan pada satu fungsi akan memengaruhi fungsi lainnya, dan akhirnya mengganggu kinerja keseluruhan sistem.

Dalam situasi seperti ini, daya lentur sistem sosial sekolah menjadi sangat penting. Sekolah berupaya menyeimbangkan tuntutan adaptasi yang rendah dengan penguatan nilai-nilai budaya lokal untuk menjaga stabilitas sosial. Namun, tanpa intervensi struktural yang lebih kuat, misalnya dukungan kebijakan yang kontekstual, mekanisme kolaborasi yang lebih formal, dan peningkatan sumber daya, kesenjangan ini cenderung akan bertahan atau bahkan membesar.

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah di wilayah rural Indonesia bukan sekadar ruang pembelajaran formal, tetapi merupakan sistem sosial yang berfungsi adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi setempat sekaligus menjadi arena reproduksi struktur sosial yang ada. Melalui kerangka AGIL Parsons, terlihat bahwa ketimpangan pendidikan di daerah rural muncul bukan hanya karena keterbatasan sumber daya, melainkan akibat interaksi yang tidak seimbang antar keempat fungsi sistem sosial sekolah. Adaptasi berjalan dalam kondisi minimal, di mana

sekolah berupaya menyesuaikan diri terhadap situasi ekonomi keluarga siswa, namun daya dukungnya terbatas. Fungsi pencapaian tujuan berlangsung melalui transmisi nilai mobilitas sosial, tetapi tidak sepenuhnya efektif karena keterbatasan infrastruktur dan kebijakan yang tidak kontekstual. Integrasi sosial memang terwujud melalui jejaring kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan komunitas, namun sifatnya masih informal dan rapuh. Sementara itu, pemeliharaan nilai lokal yang kuat memberi stabilitas sosial, tetapi pada saat yang sama menimbulkan ketegangan terhadap tuntutan modernisasi pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa sekolah sebagai sistem sosial memiliki daya lentur yang memungkinkan keberlangsungan pendidikan, tetapi juga kerentanan struktural yang memperdalam kesenjangan bila tidak diimbangi dengan intervensi kebijakan yang adaptif dan holistik. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pembacaan empiris terhadap dinamika AGIL dalam konteks sekolah rural, memperlihatkan bahwa solusi terhadap kesenjangan pendidikan tidak dapat bertumpu pada aspek infrastruktur atau kurikulum semata, melainkan harus menyasar relasi fungsional yang membentuk sistem sosial sekolah secara utuh dan kontekstual.

REFERENSI

- Abfalter, D., Mueller-Seeger, J., & Raich, M. (2021). Translation decisions in qualitative research: a systematic framework. *International Journal of Social Research Methodology*, 24(4), 469–486.
<https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805549>
- Afdhal, A., Manuputty, F., Litaay, S. C. H., & Makaruku, N. D. (2024). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Maluku dalam Hidden curriculum: Strategi Membangun Perdamaian dan Toleransi di Sekolah Dasar. *Journal of Education Research*, 5(4), 5071–5083.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1707>
- Banaji, M. R., Fiske, S. T., & Massey, D. S. (2021). Systemic racism: individuals and interactions, institutions and society. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 6(1), 82.
<https://doi.org/10.1186/s41235-021-00349-3>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Ekaputri, R. A., Sukiyono, K., Yefriza, Y., Febriani, R. E., & Nopiah, R. (2025). Gendered Dimensions of Poverty in Indonesia: A Study of Financial Inclusion and the Influence of Female-Headed Households. *Economies*, 13(8), 240.
<https://doi.org/10.3390/economies13080240>
- Fadhil, I., & Sabc-El-Rayess, A. (2021). Providing Equity of Access to Higher Education in Indonesia: A Policy Evaluation. *Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE)*, 3(1), 57–75.
<https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376>
- Faizah, C., Yamada, K., & Pratomo, D. S. (2021). Information and communication technology, inequality change and regional development in Indonesia. *Journal of Socioeconomics and Development*, 4(2), 224.
<https://doi.org/10.31328/jsed.v4i2.2669>
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2024). Indonesia social progress: the role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 428–457.
<https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>
- Hakim, D. R., & Rosini, I. (2022). Regional Income Inequality in Indonesia: The Role of Public and Private Investment. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 56(3), 87–101. <https://doi.org/10.17576/JEM-2022-5603-05>
- Hasmawati, H., Winarti, W., Jumriani, J., Arfah, M. I. C., & Jafar, J. (2024). The Effect of Community-Based Entrepreneurship Development Programs on Improving the Economic Welfare of Communities in Rural Areas. *Celebes Journal of Community Services*, 3(2 SE-Articles), 10–23.
<https://doi.org/10.37531/celeb.v3i2.1618>
- Hill, H. (2021). What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97.
https://doi.org/10.1162/adev_a_00158
- Khairunnisa, S., Haryani, D., Gusmiati, R., Putri, A. D. R., & Jolanis, J. (2025). The Influence of Education and Economic Growth on Income Inequality in Indonesia. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 6(4), 859–866.
<https://doi.org/10.38142/ijesss.v6i4.1487>
- Lestaluhu, S. F., & Sopacua, Y. (2024). Disfungsi Transmisi Linguistik Intra-Keluarga: Hambatan Sosial dan Kultural dalam Pelestarian Bahasa Daerah Suku Wayoli di Tulehu,

- Maluku. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(1), 79–94.
<https://doi.org/10.30598/populis.19.1.79-94>
- Lisnawaty, S. D. (2024). A Systematic Analysis of Literature Review Strategies for Implementing Out-of-School Education in Remote Areas. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi*, 1(3), 254–269.
<https://doi.org/10.61397/jkpp.v1i3.202>
- Litaay, S. C. H., Manuputty, F. M. L., Afdhal, A., & Makaruku, N. D. (2025). Local Culture-Based Education in the Hidden Curriculum: A Strategy for Fostering Tolerance and Peace in Maluku Secondary Schools. *Society*, 13(1), 192–207.
<https://doi.org/10.33019/society.v13i1.777>
- Marougkas, A., Troussas, C., Krouska, A., & Sgouropoulou, C. (2023). Virtual Reality in Education: A Review of Learning Theories, Approaches and Methodologies for the Last Decade. *Electronics*, 12(13), 2832.
<https://doi.org/10.3390/electronics12132832>
- Mujiburrohman, & Putri, D. (2024). The Impact of Social Inequality on Educational Quality in Indonesia: Challenges and Policy Recommendations. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 3(01), 43–56.
<https://doi.org/10.61455/sujiem.v3i01.248>
- Ninghardjanti, P., Murtini, W., Hindrayani, A., & Sangka, K. B. (2023). Evaluation of the Smart Indonesia Program as a Policy to Improve Equality in Education. *Sustainability*, 15(6), 5114.
<https://doi.org/10.3390/su15065114>
- Parsons, T. (1957). *The Social System*. Free Press.
- Rafsanjani, T. A., & Rozaq, M. A. (2024). Educational Problems in Indonesia. *Solo Universal Journal of Islamic Education and Multiculturalism*, 2(02), 135–144.
<https://doi.org/10.61455/sujiem.v2i02.197>
- Romlah, S., Imron, A., Maisyaroh, Sunandar, A., & Dami, Z. A. (2023). A free education policy in Indonesia for equitable access and improvement of the quality of learning. *Cogent Education*, 10(2), 2245734.
<https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2245734>
- Setyadharma, A., Oktavilia, S., Utami, S., & Rizka Noormalitasari, A. (2021). Impacts of Education and Environmental Sustainability on Rural Income Inequality in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 232(12), 04003.
<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123204003>
- Vindrola-Padros, C., & Johnson, G. A. (2020). Rapid Techniques in Qualitative Research: A Critical Review of the Literature. *Qualitative Health Research*, 30(10), 1596–1604.
<https://doi.org/10.1177/1049732320921835>
- Welch, A., & Aziz, E. A. (2022). Higher Education in Indonesia. In *International Handbook on Education in South East Asia* (pp. 1–30).
https://doi.org/10.1007/978-981-16-8136-3_41-1
- Wirandana, P. A., & Khoirunurrofik, K. (2024). Educational inequality in Indonesia: are intergovernmental fiscal transfers effective in reducing the gap? *Educational Studies*, 50(6), 1424–1443.
<https://doi.org/10.1080/03055698.2022.2103647>